

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf, Huala. 2005. *Hukum Perdagangan Internasional*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Ali, H. Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika)
- Aprita, Serlika dan Rio Adhitya. 2020. *Hukum Perdagangan Internasional*. Ed. 1. Cet. 1. (Depok: Rajawali Pers)
- Ashshofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta)
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pajar)
- Gautama, Sudargo. 2005. *Indonesia dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional*. (Bandung: Alumni)
- Krisnayuda, Backy. 2017. *Pancasila dan Undang-undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Kencana)
- Kurniawan, Mahendra, dkk. 2007. *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*. Cetakan Ke-1. (Yogyakarta: Kreasi Total Media)
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1982. *Pengantar Hukum Internasional*. (Bandung: Bina Cipta)
- Manan, Bagir. 2006. *Konvensi Ketatanegaraan*. Cetakan Pertama. (Yogyakarta: FH UII PRESS)

- Mauna, Boer. 2000. *HUKUM INTERNASIONAL, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. (Bandung: Alumni)
- Parthiana, I Wayan. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. (Bandung: Mandar Maju)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1983. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Press)
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2006/ *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. (Yogyakarta: Kanisius)
- Sumardjono, Maria SW. 2019. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Edisi Revisi. (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada)
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta)
- Suwardi, Sri Setianingsih dan Ida Kurnia. 2019. *Hukum Perjanjian Internasional*. Cetakan Pertama. (Jakarta: Sinar Grafika)

B. Jurnal Hukum

- Penasthika, Priskila Pratita. 2015. *Urgensi Akses terhadap Apostille Convention bagi Negara-Negara Anggota ASEAN dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Perspektif Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum Vol.24, No.2. (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

Rehatta, Veriena J. B. 2016. *Indonesia dalam Penerapan Hukum Berdasarkan*

Aliran Monisme, Dualisme, dan Campuran. Jurnal Sasi Vol.22, No.1.

(Ambon: Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon)

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. 2019. *Naskah Urgensi*

Pengesahan Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of

Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi 5 Oktober 1961

Tentang Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik

Asing). (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia)

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang--Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang

Perjanjian Internasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4012

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 292

Lampiran Terjemahan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang

Pengesahan Convention Abolishing Requirement of Legalisation for

Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang *Panduan Umum Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah*), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 125

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang *Tata Cara Legalisasi Dokumen Pada Kementerian Luar Negeri*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 897

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang *Layanan Legalisasi Tanda Tangan Pejabat pada Dokumen di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 735

D. Internet

Basuki, Zulfa Djoko. “Kemungkinan Indonesia Mengaksesi *The Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents*”. <http://www.bphn.go.id/data/documents/prof-zulfa-makalah.pdf> diakses pada tanggal 26 Maret 2022 pukul 23.35 WIB

Emily O'Connor. *ICC urges States to ratify Apostille Convention for simplified authentication of public documents*. <https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-urges-states-to-ratify-apostille-convention-for-sim>

[plified-authentication-of-public-documents/](#) diakses pada tanggal 6 Januari

2022 pukul 11.40 WIB

Hikmah, Mutiara. *Indonesia dan Konvensi Apostille.*

<https://law.ui.ac.id/v3/indonesia-dan-konvensi-apostille-oleh-dr-mutiara-h>

[ikmah/](#) diakses pada tanggal 18 Oktober 2021 pukul 17.54 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Pengertian Konvensi.*

<https://kbbi.web.id/konvensi>, diakses pada tanggal 30 Desember 2021

pukul 13.34 WIB

Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, Kerajaan Inggris. “*Legalisasi*

Dokumen”. https://kemlu.go.id/london/id/pages/legalisasi_dokumen/1147/

[about-service](#) diakses pada tanggal 8 Maret 2022 pukul 13.18 WIB

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Negara Melindungi:*

Pemerintah Akan Sederhanakan Legalisasi Dokumen Publik Lewat

Sertifikat *Apostille.*

[https://kemlu.go.id/portal/id/read/3566/berita/pemerintah-akan-sederhanakan](https://kemlu.go.id/portal/id/read/3566/berita/pemerintah-akan-sederhanakan-legalisasi-dokumen-publik-lewat-sertifikat-apostille)

[an-legalisasi-dokumen-publik-lewat-sertifikat-apostille](#) diakses pada

tanggal 31 Mei 2022 pukul 20.53

Taqiyya, Saufa Ata. *Perlukah Dokumen Asing Dilegalisasi di KBRI.*

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt60053590761ab/perlu>

[kah-dokumen-asing-dilegalisasi-di-kbri-/](#) diakses pada tanggal 5

September 2021 pukul 11.56 WIB